

Partai Komunis Indonesia dalam Persaingan Menuju Pemilu DPRD 1957 di Jawa Timur

Eriyano Wempy Gilarsi¹

Diserahkan: 28 Maret 2023 | Diterima: 22 Mei 2023 | Diterbitkan: 28 Agustus 2023

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang persiapan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjelang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Timur tahun 1957. DPRD hasil pemilihan umum (pemilu) perlu segera dibentuk untuk kemudian ditugaskan memilih Kepala Daerah. Selain sudah menjadi agenda pemerintah, pemilihan umum ini ditujukan untuk memenuhi tuntutan otonomi daerah yang semakin gencar pada akhir 1950-an. Jawa Timur menjadi salah satu daerah diselenggarakannya pemilu ini dan PKI menjadi salah satu kontestan yang paling berambisi memenangkannya. Dengan menggunakan metode sejarah melalui pendekatan sejarah politik behavioral, maka penulis menganalisis upaya yang dilakukan oleh PKI dalam menyongsong Pemilu DPRD di Jawa Timur. Data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari arsip dan surat kabar yang terbit pada tahun 1950-an, buku, jurnal, dan disertasi. Selain tampil sebagai partai yang mengusung cita-cita persatuan nasional untuk mendekati massa, upaya PKI dalam mengumpulkan dana pemilu tampak lebih terorganisir. Meskipun dihadang dengan keadaan darurat militer dan peniruan tanda gambar oleh partai-partai lain, PKI mampu menghadapinya dengan gigih. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam mempersiapkan diri menuju Pemilu DPRD

1 Magister Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: wempy.gilarsi@mail.ugm.ac.id.

1957 di Jawa Timur, PKI sedang dalam tren yang baik sehingga sengitnya persaingan dengan segenap partai lain juga dapat diatasi dengan taktik yang jitu, yaitu menunggangi isu-isu teraktual.

Kata Kunci: PKI; Pemilihan Umum; DPRD; Jawa Timur

PENDAHULUAN

Pada paruh kedua dasawarsa 1950-an, pemerintah Indonesia memiliki agenda pemilihan umum (Pemilu) di tingkat daerah untuk memilih DPRD (Leirissa dan Djamhari (ed.), 1993: 132). Di sekitar tahun-tahun itu, sentimen kedaerahan juga sedang menguat dengan tuntutan otonomi (Wertheim, 1999: 267–268). Jawaban yang diberikan pemerintah baru sebatas melahirkan Undang-undang (UU) No. 1/1957 tentang otonomi daerah (Anderson, 2000: 194). Pemilu DPRD yang sudah menjadi program Kabinet Ali Sastroamidjodjo II, baru terlaksana pada era Kabinet Djuanda. Di tengah fase transisi kabinet itu, Presiden Sukarno menetapkan status darurat perang berdasarkan *Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (SOB) di seluruh wilayah Indonesia pada 14 Maret 1957 (Merdeka, 15 Maret 1957). Mau tidak mau, Pemilu DPRD tetap dijalankan dalam keadaan tersebut dan karenanya militer memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemilu (Harian Umum, 30 April 1957).

Pemilu DPRD dilaksanakan secara bergilir di masing-masing provinsi. Jawa Timur mendapat giliran ketiga pada 29 Juli 1957, setelah sebelumnya didahului oleh Jakarta Raya dan Jawa Tengah (Trompet Masyarakat, 9 Juli 1957). Di Jakarta Raya, Partai Komunis Indonesia (PKI) tampak sedang naik daun karena perolehan suaranya meningkat tajam dibanding Pemilu 1955 (Harian Rakjat, 28 Juni 1957). Melihat hasil itu, PKI juga berambisi memenangi Pemilu DPRD di Jawa Timur yang pada tahun 1955 menjadi basis elektoral Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan PKI waktu itu harus puas berada di urutan ketiga (Kasdi, 2009: 53). Selain NU sebagai kompetitor utama, juga ada dua kekuatan politik besar lainnya, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Madjlis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi). Untuk memenuhi target tersebut, fase persiapan pra-pemilihan umum menjadi sangat penting bagi PKI. Urgensi PKI untuk menang di Jawa Timur sangatlah tinggi mengingat pentingnya daerah ini dalam kancah politik nasional, yaitu medan tempur bagi NU, PNI, dan PKI sendiri—yang secara politik aliran merupakan tiga faksi politik besar—yang persaingannya begitu mengakar (Kasdi, 2009: 83; Taylor, 2003: 354).

Masalah-masalah yang dihadapi PKI menuju Pemilu DPRD di Jawa Timur tidaklah ringan. Selain penerapan darurat perang yang secara umum mengganggu persiapan pemilu

beserta seluruh kontestan di dalamnya, batu sandungan yang menggajal PKI juga berasal dari sesama peserta, baik dari partai dengan level nasional maupun partai lokal di Jawa Timur. Persoalan tersebut berupa penjiplakan tanda gambar (Arsip Kabinet Presiden RI 1950–1959, No. 1028). Dibandingkan dengan NU yang juga mengalami masalah serupa, kasus yang menimpa PKI dalam hal ini jauh lebih problematik (Harian Rakjat, 12 Juni 1957).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persiapan Partai Komunis Indonesia menjelang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Jawa Timur tahun 1957. Riset ini berada di bawah payung studi sejarah politik. Sejarah politik menggunakan perspektif sejarah untuk menyelidiki peristiwa atau gejala politik (Suwarno, 2015: 91). Pendekatan ilmu sosial dalam metode baru sejarah politik akan memperluas cakrawala politik, lebih multifaset, dan memiliki pandangan politik yang menyeluruh, termasuk ketergantungan proses politik pada sistem nilai, jaringan sosial, dan lain-lain (Kartodirdjo, 1992: 166). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah *behavioral* yang menurut Kuntowijoyo merupakan salah satu

pendekatan dalam sejarah politik yang mengkaji perilaku partai-partai politik dan negara dalam rekrutmen pimpinan/anggota, sosialisasi gagasan, dan implementasi tindakan politik (Kuntowijoyo, 2003: 179).

KAJIAN PUSTAKA

Kajian seputar sejarah politik di Indonesia pada umumnya menempatkan peristiwa Pemilu 1955 sebagai pusat perhatian. Padahal, ada peristiwa lain yang tidak kalah penting, seperti Pemilu DPRD 1957. Berikut ini diuraikan beberapa kajian terdahulu sebagai pembanding terhadap penelitian ini. *Pertama*, kajian berjudul *Strategi Partai Komunis Indonesia Terhadap Petani dan Pengaruhnya di Jawa Timur (1953–1965)* merupakan skripsi dari Bari (2008). Skripsi ini lebih dititikberatkan pada kegiatan politik PKI untuk mendapatkan atensi lebih dari kaum tani dalam usaha memperoleh kekuasaan. Dia mengklaim bahwa keberhasilan PKI dalam perjuangan politik nasional—mulai dari memenangkan pemilihan umum hingga mencapai puncaknya dengan pelaksanaan *land reform*—sangat dipengaruhi oleh kemampuannya memobilisasi kaum tani secara keseluruhan. Bagian pemilihan DPRD Jawa Timur tahun 1957 hanya ditelaah secara singkat terkait dengan pemilihan umum tahun 1955 dan 1957 yang tercakup dalam salah satu subbab ini

tidak cukup untuk menjelaskan peristiwa itu secara detail. Meski tidak secara khusus mengkaji pemilu, skripsi ini bermanfaat untuk memahami pemilu dari perspektif partai, seperti PKI dan situasi di Jawa Timur masa itu.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Radyatma (2014) berjudul *Pertarungan Kampanye PKI, Nahdatul Ulama, dan Masyumi Menjelang Pemilu Tahun 1955 di Surabaya*. Skripsi ini mengkaji pertikaian politik yang meletus pada masa kampanye Pemilu 1955. Ia menegaskan, friksi antarpolisi merupakan hal yang lumrah dalam dinamika demokrasi dengan fokus pada PKI, NU, dan Masjumi. Selain itu, strategi ini sangat efektif untuk mengumpulkan suara. Ini menunjukkan bahwa Surabaya adalah contoh dari tiga partai politik di kawasan itu yang hidup berdampingan. Tulisan ini secara umum berguna untuk mencermati aktivitas partai politik dalam mempersiapkan diri bersaing dalam pemilihan umum. Selain itu, PKI dan kedua partai lainnya adalah partai yang kuat tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga di seluruh Indonesia.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Sonhaji dan Maulida (2020) berjudul *Komunikasi Politik dan Kecenderungan Pilihan Partai Kaum Santri dan Abangan pada Pemilu 1955*. Fokus kajian ini terletak pada pola komunikasi politik yang ditampilkan partai-partai pada Pemilu 1955 yang nantinya melahirkan faksi-faksi di dalam masyarakat, dua yang terbesar

adalah santri dan abangan. Dua kubu itulah yang menjadi penyumbang utama dari empat partai besar (PNI, PKI, Masjumi, NU). Sangat jelas bahwa pemilu yang dibahas dalam artikel ini adalah yang ada pada tahun 1955. Namun, bukan berarti tidak terkait sama sekali dengan pemilu daerah pada 1957. Ini karena polarisasi pasca-pemilu nasional itu masih terbawa ke daerah-daerah hingga tahun-tahun setelahnya. Dari situlah titik keberangkatan dari kajian berikut ini yang akan melihat bagaimana eksekusi tersebut dalam cakupan yang lebih spesifik seperti Jawa Timur.

Berdasarkan pengamatan terhadap kajian literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang secara khusus membahas tentang Partai Komunis Indonesia Pemilu DPRD 1957 untuk lingkup spasial Jawa Timur belum banyak dilakukan sebelumnya. Demikianlah penelitian ini hadir sebagai pelengkap dari kekurangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah karena memakai fakta dan sumber untuk menuliskan peristiwa di masa silam, serta terdapat periodisasi, yaitu tahun 1957. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, antara lain pemilihan topik, pengumpulan sumber,

kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013: 69). Sumber yang dipakai untuk penelitian ini terdiri atas arsip dan surat kabar yang terbit pada tahun 1950-an, buku, jurnal, dan disertasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu 1955 merupakan peristiwa bagi PKI yang menunjukkan bahwa kekuatan partai tersebut luar biasa. PKI menunjukkan kekuatannya dengan berhasil naik ke peringkat empat nasional. Untuk PKI, hasil pemilu tersebut merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Para pimpinan dan kader PKI mengakui bahwa hasil ini bertentangan dengan citra buruk PKI sebelumnya. Baik trauma politik peristiwa Madiun tahun 1948 maupun peran PKI di balik pemogokan tahun 1950–1955 memperjelas bahwa hal ini tidak berdampak negatif yang signifikan terhadap keberhasilan pemilu mereka (Subhan, 2021: 146). Di Jawa Timur, PKI berhasil mengalahkan kemenangan PNI dan Masjumi namun tetap tidak mengalahkan NU (Subhan, 2021: 153). Keikutsertaan PKI dalam pemilihan DPRD tahun 1957 berlangsung bersamaan dengan pemilihan sebelumnya, yaitu di bawah pimpinan Aidit. Kalau dipikir-pikir prestasi tahun 1955,

untuk membuat Jawa Timur jatuh ke tangan PKI pada tahun 1957 maka partai ini cukup menuntaskan persaingan dengan NU dan PNI sebab Masjumi bukan lagi sebagai faktor penentu. Berikut diuraikan persiapan PKI menghadapi pemilu itu.

VISI PARTAI: CITA-CITA FRONT PERSATUAN

PKI adalah partai berideologi komunis dengan sentuhan tradisionalisme Jawa (Feith dan Castles (ed.), 1995: lvi). Menurut peraturan partai, PKI adalah partai yang berlandaskan Marxisme-Leninisme yang tujuannya adalah mewujudkan masyarakat sosialis di Indonesia (Kepartaian di Indonesia Seri Pepora 8, 1951: 281). Setelah menjadi pemimpin baru, Aidit membawa gayanya sendiri ke dalam partai. Aidit tampaknya menjadi pionir dalam proses penafsiran luas atas ideologi dan propaganda doktrin komunis (Aidit, 1955a: 150; Kroef, 1956: 345; Subhan, 2021: 97).

Prestasi PKI pada tahun 1955 tidak terlepas dari strateginya memobilisasi dan mengorganisir massa, di samping buruh adalah petani. (Aidit, 1955b: 15–16). Oleh karena itu, andalan partai di pedesaan adalah buruh tani tak bertanah dan petani miskin, khususnya Abangan Jawa (Eklöf, 2004: 34). Kondisi khusus desa yang dapat dilihat sebagai konflik antarkelompok agama, seperti santri-abangan

adalah kondisi yang ditafsirkan lewat teori komunisme untuk kepentingan PKI (Sanit, 2000: 70–71). Sikap patriotis, moderat, dan fleksibilitas PKI sesaat dan sesudah pemilu membawa keberhasilan besar bagi organisasi dalam mengeruk jumlah suara. Untuk itu, PKI memiliki alasan kuat untuk tetap mempertahankan strategi kepemimpinan partai dan sistem politik nasional yang telah menyejahterakan partai (Mortimer, 2006: 68).

Dalam pemilihan DPRD (1957), PKI kembali menggunakan praktik yang berlainan namun dengan taktik yang serupa. Dalam tulisannya di *Harian Rakjat*, Njoto mengatakan bahwa kampanye pemilihan DPRD harus nyata, simpel, dan fokus pada masalah ekonomi dan sosial. Hal ini sangat kontras dengan pemilihan parlemen pusat yang lebih general dan sangat politis (*Harian Rakjat*, 14 Mei 1957). Untuk meraup suara massa, PKI mendesak calon pemilihnya untuk berhati-hati terhadap pengkhianatan kaum reaksioner. Kepentingan daerah sebagai kedok yang dipakai oleh reaksioner dicontohkan melalui kasus Sumatera Barat, karena itulah yang merintangangi pemilihan DPRD dan pembentukan pemerintahan otonomi daerah yang demokratis (*Harian Umum*, 12 Februari 1957).

Sebelum tahun 1957, kekuasaan dan prestise partai-partai pada umumnya menurun, tetapi mereka mencoba menyasati dua kekuatan politik penting lainnya. Antara dua kekuatan politik penting, seperti Sukarno dan tentara, PKI memilih Sukarno sebagai mitra dalam simbiosis timbal balik (Hindley, 1961: 461). Pernyataan dan tindakan partai selama masa transisi ini menunjukkan bahwa pendekatannya didorong oleh isu politik jangka pendek dan bukannya kecenderungan ideologis atau analisis pandangan dan perspektif komunis untuk waktu yang lama (Mortimer, 2006: 68–69). Penerimaan PKI terhadap Demokrasi Terpimpin dalam arti bahwa partai ini menerima demokrasi yang anti-liberalisme walaupun yang diharapkan adalah demokrasi rakyat (Bahan-bahan untuk Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia, 1958: 31).

Audit selaku ketua CC (Central Komite) PKI berdalih bahwa konsepsi Presiden Sukarno yang membuat kabinet yang terbuka untuk semua golongan adalah sebuah konsep yang bukan hanya adil dan realis, melainkan juga menjamin persatuan (Utomo, 2019: 142). Sebagaimana yang termaktub di dalam Sidang Pleno ke-V CC PKI (Antara, 5 Juli 1957),

PKI menyadari bahwa dengan totalitas mendukung konsepsi Presiden telah menjadi kunci sukses dalam pencapaian di Jakarta Raya. Bukti konkretnya adalah menjadi salah satu partai pemenang (Harian Rakjat, 26 Juni 1957).

Petinggi PKI Jawa Timur antara lain Ruslan Kamaludin sebagai Ketua Provinsi Komite (Provcom) dan Mochamad Slamet sebagai Sekretaris. Sebagai wakil PKI di tingkat provinsi, Ruslan Kamaludin menunjukkan sikapnya terhadap Konsepsi Presiden. Dia mengungkapkan, pembentukan kabinet berimbang, termasuk PKI, bisa menghilangkan bias terhadap pihak lain. Ruslan menggunakan kerja sama di lingkungan Dewan Pimpinan Daerah sebagai tandanya (Harian Umum, 25 Februari 1957).

Sementara pada bulan Juni 1957, diadakan pemilihan DPRD yang pertama di Jakarta Raya. Dalam pemilihan tersebut, PKI menempati posisi kedua dan memperoleh jumlah suara yang luar biasa (Harian Rakjat, 28 Juni 1957). Pencapaian ini selanjutnyadijadi pengalaman yang sangat berharga untuk mempersiapkan pemilu di daerah lain termasuk Jawa Timur. Harian Rakjat dalam salah satu editorialnya menulis:

“Mengenai pemilihannya sendiri, karena tiga minggu lagi pemilihan juga sudah akan dilangsungkan di Djawa Timur dan Djawa Barat, baik ditarik pelajaran,

bahwa persiapan2 teknis sampai hal2 jang seketjil2nja, sama sekali tidak boleh diremehkan. Djuga tentang surat pemberitahuan, dan soal2 kontrole pada umumnja, harus mendapat perhatian jang sebesar-besarnja. Dalam hal ini, aktivitet tidak boleh dibatasi pada minoritet jang ketjil, tetapi massa sendiri, massa jang banjak itu harus aktif dan dikembangkan aktivitetnja, otoaktivitetnja.” (Harian Rakjat, 26 Juni 1957).

Tiga poin yang bisa dijadikan pelajaran untuk pemilihan DPRD di Jakarta Raya, antara lain *pertama*, menjaga daftar pemilih sedemikian rupa sehingga orang yang terdaftar juga masuk daftar pemilih dan menjamin tidak ada yang kehilangan hak pilihnya; *kedua*, surat pemberitahuan pemilih harus diverifikasi; dan *ketiga*, untuk mencegah kesalahan pemungutan suara, yaitu dengan simulasi pemungutan suara (Harian Rakjat, 1 Juli 1957). Menyusul edisi ini, Harian Rakjat menambahkan kolom yang mengingatkan pembacanya tentang pemilihan anggota DPRD di Jawa Timur (Harian Rakjat, 4 Juli 1957).

Rapat umum PKI ke-V membahas peristiwa pelemparan granat di kantor CC PKI dan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Pihak itu menyatakan, aksi granat tak lepas dari kemenangan PKI dalam pemilihan DPRD di Jakarta Raya. PKI melihat reaksi dari kubu antikomunis

yang tidak menyukai prestasi PKI, apalagi kemenangan itu terjadi di tempat lain (Trompet Masyarakat, 9 Juli 1957). Secara materiil, peristiwa ini jelas merupakan tragedi yang tidak menguntungkan PKI. Namun, partai ini dengan cerdas mengubah bencana yang dialaminya menjadi dukungan moral bagi partai-partai penentang gerakan subversif.

Visi dan misi partai di provinsi ini dimuat dalam Harian Rakjat tanggal 13 Juni 1957. Dalam edisi kali ini, Harian Rakjat banyak menyinggung masalah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Apalagi mengingat rendahnya upah yang dibayarkan kepada pekerja dan perlakuan upah yang berbeda antara pekerja laki-laki dan perempuan. Provcem PKI Jawa Timur membahas kesejahteraan petani, kepemilikan tanah antara petani dan pemilik tanah, dan kesejahteraan sosial buruh tani dengan beban pajaknya. Setiap uraian yang dibuat dalam penyusunan program disertai dengan ungkapan-ungkapan provokatif yang memojokkan pemerintah (Harian Rakjat, 13 Juni 1957).

Setelah memaparkan berbagai isu terkait kesejahteraan dan pembangunan masyarakat sebagai latar belakang. Provcem PKI Jawa Timur kemudian memaparkan program kerjanya dan tersedia lima program utama.

Kelima program tersebut, di antaranya tentang keamanan dan demokratisasi, pembangunan dan otonomi, ketenagakerjaan, agraria, dan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat (Maulida, 2019: 102).

Fenomena yang tidak kalah penting di sekitar pra-pemilu di Jawa Timur adalah beredarnya isu liar mengenai penundaan jadwal pemilu tersebut. Penundaan ini berlaku sejak 1 Juli 1957 (Antara, 5 Juli 1957). Beberapa hari se usai pengumuman penundaan hari pencoblosan, Seksi Komite (Secom) PKI Kota Madiun malah masih sibuk dengan rencana kampanyenya. Mereka membentuk panitia untuk safari politik DN. Aidit pada 11 Juli. Semua berita yang beredar di media tidak dianggap sebagai berita resmi. Mereka mengikuti jadwal 17 Juli hingga mendapatkan perintah resmi. Jika penundaan itu nyata, partai menyatakan kekecewaan (Trompet Masyarakat, 6 Juli 1957). Melihat PKI yang selama ini sangat bergairah dalam menyambut pemilihan DPRD, cukup mengejutkan jika petinggi partai belum bisa memastikan kabar penting tersebut di kota ini.

Yang menarik tidak hanya tentang pergeseran waktu kampanye dan pemungutan suara, tetapi juga tentang imbasnya pada siasat persaingan di antara partai empat besar. Dari pihak penyelenggara—yang dalam hal ini adalah Gubernur Samadikun sebagai ketua

Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Jawa Timur dan Kolonel Sarbini sebagai Panglima Militer Jawa Timur—menyatakan bahwa penundaan pemilu disebabkan oleh belum tuntasnya pembiayaan. Di pihak yang lain, para politisi PKI memanfaatkan isu ini untuk menggiring opini bahwa penundaan pemilu merupakan alasan di balik belum siapnya partai-partai untuk berlaga, seperti Masjumi, NU, dan PNI (Trompet Masyarakat, 10 Juli 1957). Terlihat bahwa ternyata PKI secara tidak langsung ingin menjatuhkan citra lawan-lawan politiknya, sekaligus menunjukkan bahwa partai ini juga mempertimbangkan dengan serius betapa pentingnya faktor finansial dalam pemilu.

PENDANAAN PEMILU DAN PENCALONAN

Aspek keuangan untuk mempersiapkan pemilihan DPRD tidak boleh diabaikan. Hal ini karena kegiatan operasional partai sepenuhnya bergantung pada dana yang tersedia untuk mereka. Semakin banyak dana yang terkumpul oleh partai, semakin banyak kelonggaran dalam menjalankan kinerjanya. Dibandingkan dengan partai-partai lain yang kondisi keuangannya lebih buruk karena telah selesai berkampanye pada Pemilu 1955, PKI memiliki pendapatan yang relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mencetak tanda gambar baru (Keng Po, 16 Juni 1957).

Sumber daya yang sangat besar yang dimiliki PKI tidak hanya digunakan untuk mempersiapkan organisasi untuk kegiatan kampanye, tetapi juga untuk mendapatkan perhatian dan dukungan publik dengan menggunakan berbagai teknik (Hindley, 1961: 466). PKI Jawa Timur mengklaim bahwa dana tersebut berasal dari para pendukung PKI di Jawa Timur (Harian Rakjat, 8 Mei 1957). Partai tersebut telah menerima 13.138 wesel pos dari masyarakat berbagai kalangan.

HUT ke-37 PKI juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan uang. Subseksi Comite (Subsecom) PKI Nyamplungan Surabaya merayakan hari jadi partai tersebut pada 29 Mei. Dimeriahkan dengan pesta-pesta, seperti kebiasaan partai ini mengadakan hiburan rakyat. Tidak kurang dari 300 orang hadir di Desa Sukodono dan sumbangan untuk PKI berasal dari orang-orang ini. Sumbangan selanjutnya berupa makanan yang akan disediakan, juga ada pencak dan pertunjukan orkes menambah kemeriahan, sedangkan sumbangan alat tulis difungsikan untuk Pemilu DPRD (Harian Umum, 4 Juni 1957). Dengan kata lain, PKI hampir tidak mengeluarkan uang untuk mengadakan pesta ulang tahun yang begitu fantastis. Sebaliknya, partai ini menghasilkan pendapatan, bahkan bonusnya adalah dukungan rakyat.

Saat reputasi PKI tumbuh berkat keajaiban penggalangan dananya, ternyata tetap ada kabar buruk. Pada hari-hari menjelang kampanye pemilu, berdasarkan penyelidikan polisi di Kota Surabaya, diketahui kader PKI menyimpan daftar permintaan bantuan dana untuk memperlancar misi mereka dalam Pemilu DPRD di kota itu. Daftar tersebut mencakup nama-nama sebagian besar orang Tionghoa. Dinamika selanjutnya, ternyata PKI sangat menargetkan posisi Wali Kota Surabaya (Surabaja Post, 19 Juli 1957). Kasus tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran apabila terdapat unsur paksaan.

Apabila pengaruh NU kuat di desa, maka PKI adalah sebaliknya (Keng Po, 16 Juni 1957). Dalam tahap pencalonan, PKI sangat pandai menggunakan “orang tak berpartai” untuk mencalonkan partai tersebut. Ini ditunjukkan dengan banyaknya calon PKI di perkotaan karena banyak yang bekerja di daerah tersebut sebagai buruh (Trompet Masyarakat, 1 Juli 1957; Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950–1959, No: 1930). Sejak Juni 1957, kelas buruh telah menyambut pemilihan umum dengan sangat antusias. SOBSI Cabang Probolinggo mencontohkan pentingnya Pemilu DPRD bahwa pemilihan parlemen ini menguntungkan kepentingan rakyat daerah. Pengawasan terhadap

pemerintahan daerah juga dipermudah untuk mencegah keotoriteran. Karena itu, mereka meminta pemerintah menggelar pemilu tepat waktu (Arsip Kabinet Presiden RI 1950–1959, No: 941).

Tenaga kerja memiliki kedekatan ideologis dengan PKI sehingga kerja sama kedua belah pihak, terutama dengan SOBSI, kuat. Di Kota Surabaya, banyak tokoh buruh yang mencalonkan diri independen dan masuk dalam daftar calon PKI, seperti Moch. Rowi (Sekretaris SOBSI Cabang Surabaya) dan Moh. Imam (Sekretaris Umum I SBIM Surabaya). Untuk memenangkan pencalonannya, para buruh pabrik membentuk “Panitia Pendukung Pencalonan DPRD”. Program badan ini adalah pendidikan aktif dan propaganda di lingkungan buruh (Harian Umum, 26 Juni 1957; Trompet Masyarakat, 15 Juli 1957).

Gedung Tumapel menjadi tempat digelarnya simposium pada tanggal 8 dan 9 Juli 1957 oleh PKI Secom Kota Malang. Calon PKI untuk Pemilu DPRD dan Angkatan '26 hadir dalam kesempatan itu. Konferensi tersebut menghasilkan resolusi tentang Dewan Banteng, pemilihan umum, biaya kebutuhan pokok, dan kenaikan pajak. “Sehubungan dengan pemilihan umum, ada permintaan kepada Penguasa Militer agar tidak membatasi keleluasaan partai dalam berkampanye, baik melalui ceramah, tanda gambar, maupun rapat umum,”

demikian ujar Sajuti Tabrani dan Hidajat Djati (Sekretaris Umum Secom PKI Kota Malang). Partai juga meminta perpanjangan masa kampanye. Dengan demikian, selama pemilihan umum, militer harus lebih fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan keamanan. Dengan adanya konferensi menjelang hari pemilu ini, PKI juga bertujuan untuk melatih para pemilih agar tidak terkecoh dengan tanda gambar yang mirip Palu Arit. Gambar yang disita polisi harus dikembalikan kepada masing-masing pihak (Harian Umum, 11 Juli 1957; Trompet Masyarakat, 11 Juli 1957).

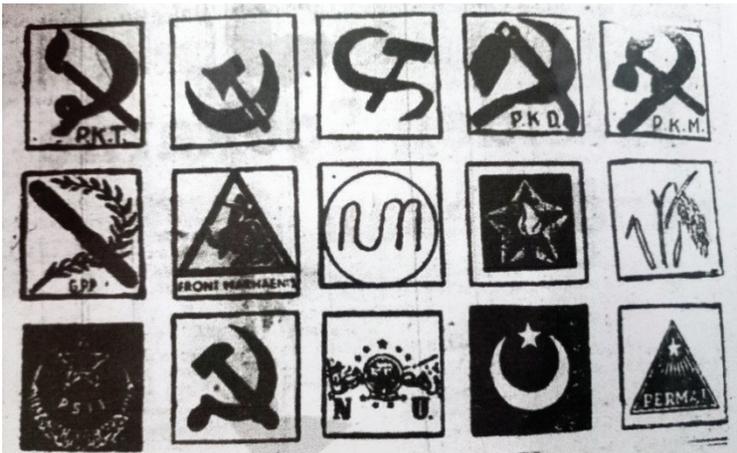
MEMBERANTAS PENIRU GAMBAR PALU ARIT

Banyak protes terhadap validasi tanda gambar yang dilegalisasi oleh Panitia Pemilihan Daerah. Ada pihak yang memprotes PPD dan menyiratkan kritik terhadap pihak lain yang dianggap melakukan kecurangan. Kemiripan gambar penanda tersebut merupakan bentuk penipuan. PKI yang notabene sama-sama partai utama mengalami kasus serupa yang merugikan mereka.

Hal ini sering menimbulkan keluhan dari PKI di berbagai tempat. Peristiwa ini terjadi di Magetan, pada April 1957. PKI menemukan lima tanda di Magetan yang menyerupai

Palu Arit mereka, ketiga di antaranya juga disebut mirip dalam segi penulisan nama. Kecurangan seperti ini dianggap PKI sebagai sebuah upaya untuk mengelabui mata pemilih, terutama calon pemilih PKI (Harian Rakjat, 20 April 1957).

Gambar 1. Tanda Gambar yang Mirip PKI



Sumber: Harian Rakjat, 20 April 1957

PKI mengambil langkah-langkah luas dari pusat hingga daerah dalam menyelesaikan kasus ini. PKI berjuang melalui fraksinya di DPR di tingkat nasional dengan mengirimkan delegasi ke Kementerian Dalam Negeri (KDN). Menteri terkait mengirimkan telegram berisi arahan PPD dalam menangani kejadian semacam ini ke seluruh daerah sebagai respons atas laporan tersebut. Namun, meskipun gambar-gambar serupa ini dilarang, pelanggaran terus berlanjut. Wajar saja,

mengingat proses ini sudah dilakukan berkali-kali, hasil yang didapat tidak seperti yang diharapkan. PKI berjuang di tingkat daerah akibat ketidakpuasan terhadap upaya di tingkat pusat.

Di Malang, persoalan ini dimasukkan dalam agenda sidang pleno DPRD Peralihan Kabupaten Malang (Harian Rakjat, 20 April 1957; Harian Umum, 26 April 1957). Untuk percepatan langkah ini Politbiro CC PKI menerbitkan pernyataan yang bertanggal 29 April 1957, seperti dalam kutipan berikut.

“Dengan muka tebal “komunis2”-gadungan model “Acoma” mau menipu dan menjesatkan pemilih2 jang mentjintai simbul Palu-Arit, simbul persatuan kaum buruh dan kaum tani. Di-daerah2 pemilihan Kabupaten Magetan, Lumadjang, Kediri, Situbondo, Klaten, dan Wonogiri, di-daerah2 pemilihan Kotabesar Surabaya dan Kediri, beberapa koruptor politik telah menggunakan motif “palu-arit” atau gambar2 jang mirip dengan Palu-Arit sebagai tandagambar mereka dalam pemilihan DPRD.” (Arsip Kabinet Presiden RI 1950-1959, No: 1028)

Desakan disampaikan untuk Menteri Dalam Negeri (Sanusi Hardjadinata) melalui pernyataan itu. Desakan juga disampaikan kepada Panitia Pemilihan Daerah dan Penguasa Militer supaya pelanggaran ini ditangani sesegera mungkin. Seluruh kader PKI di semua tingkatan dianjurkan

melatih ketelitian para pemilih partainya. Di luar substansi tuntutanannya, melalui pernyataan itu terlihat bahwa sangat penting bagi PKI untuk menampilkan dirinya sebagai partainya kaum buruh dan tani. Ini secara tidak langsung sudah bermuatan kampanye dengan memainkan isu keberpihakan kepada rakyat kecil.

Menjelang Mei 1957, di Jawa Timur masih memiliki sejumlah gambar menyerupai PKI (Harian Rakjat, 8 Mei 1957). Di provinsi ini, PKI berinisiatif mengirimkan delegasi, namun kali ini menemui penguasa militer Jawa Timur. Ruslan Kamaludin dan Moch. Slamet yang mewakili Provinsi Komite PKI Jawa Timur menemui A. Sjarif selaku Kepala Staf Penguasa Militer Jawa Timur. Dalam pertemuan di Surabaya itu, PKI mencatat bahwa dari beberapa daerah di Jawa Timur yang terjadi peristiwa serupa, Magetan merupakan salah satunya. Delegasi PKI mendapat tanggapan positif dari A. Sjarif untuk dilakukan penyelidikan lanjutan. Sjarif juga menyatakan bahwa penguasa militer selalu siap membicarakan persoalan daerah (Harian Rakjat, 7 Mei 1957). Keadaan ini tidak lepas dari berlangsungnya status darurat perang, dimana militer memiliki hak untuk menyelesaikan insiden tersebut.

Dengan adanya gugatan terhadap pihak Acoma (Angkatan Komunis Muda), bisa dikatakan nasib Acoma di Kabupaten Malang terancam (Harian Umum, 25 Mei 1957).

Di tempat lain, PPD Kabupaten Pasuruan memutuskan dalam rapat umum akhir Mei lalu menolak logo Acoma. Meskipun keputusan itu sudah diambil di tingkat kabupaten, penyelesaian untuk level provinsi tidak terjadi (Harian Rakjat, 31 Mei 1957). Tidak patah arang, untuk kesekian kalinya PKI kembali mengirimkan utusan ke pemerintah pusat (Harian Rakjat, 6 Juni 1957) terkait.

Protes dari PKI semakin membesar setelah diketahui adanya sikap “tebang pilih” oleh kementerian terkait. KDN menuntaskan kasus tanda gambar NU tanpa berlarut-larut, namun hal ini tidak dilakukan dalam perkara “Acoma-PKI”. Menteri Sanusi yang diharapkan menjadi jawaban terakhir justru mengembalikan tuntutan PKI ke PPD Jawa Timur (Harian Rakjat, 12 Juni 1957). Singkatnya, fakta ini menunjukkan bahwa ternyata privilese PKI di Jawa Timur tidak sebesar yang dimiliki NU.

Keputusan yang terpaksa disetujui PKI itu semakin berlarut-larut. Sarbi, Sekretaris Subsecom PKI Lingkungan Gubeng bersama Achwan, tiba di PPD Jawa Timur pada 7 Juni 1957 untuk mendesak keputusan menerima lambang Acoma pada 29 Mei (Trompet Masyarakat, 11 Juni 1957). Dukungan terhadap PKI juga datang dari SOBSI. Organisasi buruh itu mengirimkan surat tuntutan kepada KDN dan

PPD di Jawa Timur atas nama 72.000 anggotanya (Trompet Masjarakat, 15 Juni 1957). Fakta ini dapat ditafsirkan sebagai adanya timbal balik antara PKI dengan para calon DPRD yang diusung partai tersebut.

Bukan masalah tanda gambar, penguasa militer ditemui oleh delegasi Sekretariat Comite (Secom) PKI di Madiun. Mereka menawarkan aksi kampanye yang fleksibel untuk melestarikan demokrasi. Hal ini terkait dengan suasana krisis militer yang masih berlangsung, PKI mengkhawatirkan kemungkinan pembatasan militer yang tidak semestinya dalam kampanye. Untuk menunjukkan masifnya gerakan, seluruh secom PKI di Karesidenan Madiun diagendakan melakukan aksi yang sama (Harian Rakjat, 18 Mei 1957).

PKI menyatakan protes atas terganggunya kebebasan berkampanye seperti yang dilakukan partai ini di Kota Surabaya pada 10 Juli 1957, yakni berkaitan dengan ukuran tanda gambar yang dipajang (Trompet Masjarakat, 11 Juli 1957). Kejadian ini menunjukkan bahwa intervensi militer terhadap kebijakan pemilu tidak selalu menguntungkan partai-partai pesertanya. Suatu fenomena yang tergambar melalui peristiwa tersebut juga bisa dilihat sebagai upaya militer untuk secara tidak langsung mempraktikkan cara-cara Demokrasi Terpimpin lebih dini.

Bila dilihat lebih teliti waktu pengumumannya, sebenarnya sudah diumumkan pada 4 Juni sebelumnya, sedangkan PKI memprotesnya lebih dari sebulan kemudian. Berikutnya tentang telah siapnya tanda gambar partai. Pada permulaan bulan Juli, tampak jelas bahwa hanya PKI yang paling aktif menyiapkannya. Terlebih lagi sejak Mei 1957, umbul-umbul bergambar PKI bertebaran di Kota Surabaya dalam rangka kunjungan Woroshilov. Singkat kata, kritik dari PKI ini hanya berdasarkan masalah personal. Bagi PKI, yang sejak awal menginvestasikan sumber daya yang sangat besar, jelas bahwa keberadaan peraturan ini sangat merugikan mereka.

KESIMPULAN

Persiapan yang dijalani oleh Partai Komunis Indonesia untuk mengarungi pemilihan umum DPRD di Jawa Timur pada tahun 1957 yang terjadi sejak masa pra-pemilu sangatlah kompleks dan diwarnai dinamika sehingga tidak selalu berjalan mulus. Kompleksitas tersebut pada intinya bisa dilihat dari tiga hal, yakni *pertama*, wacana besar yang diangkat sebagai tema dalam aksi kampanye. Ini dibuktikan dengan penggunaan memakai isu persatuan nasional untuk citra partai yang cinta damai sekaligus menjilat kekuatan politik Sukarno. *Kedua*, penggalangan biaya pemilu yang

rapi dan kemampuan menggaet orang-orang tak berpartai untuk dicalonkan. Itu ditengarai oleh transparansi keuangan dan banyaknya jumlah calon dari PKI di hampir semua daerah. *Ketiga*, kegigihan untuk tampil sebagai partai yang konsekuen menjalankan asas demokrasi. Yang terakhir ini ditunjukkan dengan sikap getol memerangi kecurangan tanda gambar dan bernegosiasi untuk mencegah intervensi militer yang berlebihan, salah satunya adalah kebijakan penundaan jadwal pemilu. Singkatnya, PKI sangat lihai dalam memanfaatkan setiap wacana politik yang berkembang dan melihat celah di tubuh partai lain untuk meningkatkan elektabilitas menjelang pemilihan umum.

REFERENSI

Arsip

ANRI. *Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI 1950–1959*. Mosi-mosi dari DPRDS Jawa Barat, Jawa Timur dan perorangan tentang tuntutan dilaksanakannya pemilu, 2 Juli 1951–17 Juni 1958. Nomor Arsip: 941.

_____. *Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI 1950-1959*. Surat-surat pernyataan tentang tanda gambar peserta (partai) dalam pemilu yang mirip dengan partai lainnya. 29 April–2 Juni 1957. Nomor Arsip: 1028.

_____. *Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950–1959*, jilid I. Surat Edaran wakil Perdana Menteri tentang pelaksanaan pemilihan anggota-anggota DPRD Jakarta Raya, 19 Juni 1957. Nomor Arsip: 1930.

Publikasi Resmi

Bahan-bahan untuk Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia. (1958). Jakarta: Depagitprop CC PKI.

Kepartaian di Indonesia Seri Pepora 8. (1951). Kementerian Penerangan Republik Indonesia: Jakarta.

Surat Kabar

““Tesis April” Lenin dan pemilihan untuk DPRD”, *Harian Rakjat*, 14 Mei 1957.

““Tesis April” Lenin dan pemilihan untuk DPRD”, *Harian Rakjat*, 14 Mei 1957.

“37 tahun PKI diperingati”, *Harian Umum*, 4 Juni 1957.

“37 tahun PKI diperingati”, *Harian Umum*, 4 Juni 1957.

“Acoma tak turut pemilihan”, *Harian Umum*, 25 Mei 1957.

“Acoma tak turut pemilihan”, *Harian Umum*, 25 Mei 1957.

“Audit tentang keadaan internasional dan nasional dan sikap PKI terhadap Konsepsi Presiden”, *Antara*, 5 Juli 1957.

“Audit tentang keadaan internasional dan nasional dan sikap PKI terhadap Konsepsi Presiden”, *Antara*, 5 Juli 1957.

“Akibat pemimpin² korupsi banjak angg.² partai jg lesu menghadapi P.U.”, *Trompet Masyarakat*, 10 Juli 1957.

“Akibat pemimpin² korupsi banjak angg.² partai jg lesu menghadapi P.U.”, *Trompet Masyarakat*, 10 Juli 1957.

“Akibat tanda gambar 60 x 80 menghadapkan partai² kepada fait a compli”, *Trompet Masyarakat*, 11 Juli 1957.

“Akibat tanda gambar 60 x 80 menghadapkan partai² kepada fait a compli”, *Trompet Masyarakat*, 11 Juli 1957.

“Beberapa Pengalaman & Peladjaran dari Pemilihan Umum DPRD Djakarta Raja”, *Harian Rakjat*, 1 Juli 1957.

“Beberapa Pengalaman & Peladjaran dari Pemilihan Umum DPRD Djakarta Raja”, *Harian Rakjat*, 1 Juli 1957.

“Beberapa tuntutan PKI kpd. Pem.”, *Trompet Masyarakat*, 11 Juli 1957.

“Beberapa tuntutan PKI kpd. Pem.”, *Trompet Masyarakat*, 11 Juli 1957.

“Beginilah mereka mau mengapusi Rakjat”, *Harian Rakjat*, 20 April 1957.

“Beginilah mereka mau mengapusi Rakjat”, *Harian Rakjat*, 20 April 1957.

“Dana Pemilihan PKI”, *Harian Rakjat*, 8 Mei 1957.

“Dana Pemilihan PKI”, *Harian Rakjat*, 8 Mei 1957.

“Delegasi P.K.I Djatim temui Menteri Dalam Negeri”, *Harian Rakjat*, 6 Juni 1957.

“Delegasi P.K.I Djatim temui Menteri Dalam Negeri”, *Harian Rakjat*, 6 Juni 1957.

“Delegasi PK”, *Harian Rakjat*, 20 April 1957.

“Delegasi PK”, *Harian Rakjat*, 20 April 1957.

“Delegasi PKI ke penguasa militer Djatim”, *Harian Rakjat*, 7 Mei 1957.

“Delegasi PKI ke penguasa militer Djatim”, *Harian Rakjat*, 7 Mei 1957.

“DN Aidit akan datang di Madiun”, *Trompet Masyarakat*, 6 Juli 1957.

“DN Aidit akan datang di Madiun”, *Trompet Masyarakat*, 6 Juli 1957.

“Gagalkan tanda gambar mirip”, *Trompet Masyarakat*, 15 Juni 1957.

“Gagalkan tanda gambar mirip”, *Trompet Masyarakat*, 15 Juni 1957.

“Kampanje P.U. blm boleh dilakukan?”, *Harian Umum*, 30 April 1957.

“Kampanje P.U. blm boleh dilakukan?”, *Harian Umum*, 30 April 1957.

“Keadaan Darurat Perang di Indonesia”, *Merdeka*, 15 Maret 1957.

“Keadaan Darurat Perang di Indonesia”, *Merdeka*, 15 Maret 1957.

“Mendjelang pemilihan umum DPRD Djawa Timur”, *Keng Po*, 16 Juni 1957.

“Mendjelang pemilihan umum DPRD Djawa Timur”, *Keng Po*, 16 Juni 1957.

“Minta putusan PPD Djatim ditinjau kembali”, *Trompet Masyarakat*, 11 Juni 1957.

“Minta putusan PPD Djatim ditinjau kembali”, *Trompet Masyarakat*, 11 Juni 1957.

“P.K.I. ttg. Peristiwa diatas”, *Trompet Masyarakat*, 9 Juli 1957.

“P.K.I. ttg. Peristiwa diatas”, *Trompet Masyarakat*, 9 Juli 1957.

“Panitya Pendukung Pentjalonan untuk DPRD Kotapradja Surabaya”, *Trompet Masyarakat*, 15 Juli 1957.

“Panitya Pendukung Pentjalonan untuk DPRD Kotapradja Surabaya”, *Trompet Masyarakat*, 15 Juli 1957.

“Panitya Pendukung Tjalon Buruh dalam Pemilihan DPRD KBS”,
Harian Umum, 26 Juni 1957

“Panitya Pendukung Tjalon Buruh dalam Pemilihan DPRD KBS”,
Harian Umum, 26 Juni 1957

“Pasuruan tolak Acoma”, *Harian Rakjat*, 31 Mei 1957.

“Pasuruan tolak Acoma”, *Harian Rakjat*, 31 Mei 1957.

“Pemungutan suara DPRD Djatim tgl. 29 Djuli”, *Trompet Masyarakat*, 9 Juli 1957.

“Pemungutan suara DPRD Djatim tgl. 29 Djuli”, *Trompet Masyarakat*, 9 Juli 1957.

“Persiapan kampanje pemilihan DPRD”, *Harian Rakjat*, 18 Mei 1957.

“Persiapan kampanje pemilihan DPRD”, *Harian Rakjat*, 18 Mei 1957.

“PKI anggap Kabinet berimbang tjara utk hilangkan prasangka”,
Harian Umum, 25 Februari 1957.

“PKI anggap Kabinet berimbang tjara utk hilangkan prasangka”,
Harian Umum, 25 Februari 1957.

“Problim2 Perburuhan: Menghadapi pemilihan daerah”,
Trompet Masyarakat, 1 Juli 1957.

“Problim2 Perburuhan: Menghadapi pemilihan daerah”,
Trompet Masyarakat, 1 Juli 1957.

“Rakjat Djatim dan Djateng!”, *Harian Rakjat*, 4 Juli 1957.

“Rakjat Djatim dan Djateng!”, *Harian Rakjat*, 4 Juli 1957.

“Rakjat Indonesia sedang bergeser kekiri”, *Harian Rakjat*, 28
Juni 1957.

“Rakjat Indonesia sedang bergeser kekiri”, *Harian Rakjat*, 28
Juni 1957.

“Sekali lagi: beladjar dari pemilihan DPRD-DR”, *Harian Rakjat*,
26 Juni 1957.

“Sekali lagi: beladjar dari pemilihan DPRD-DR”, *Harian Rakjat*,
26 Juni 1957.

“Sekitar penundaan pemilihan umum DPRD di Jawa Timur”,
Antara, 5 Juli 1957.

“Sekitar penundaan pemilihan umum DPRD di Jawa Timur”,
Antara, 5 Juli 1957.

“Seruan CC PKI hadapi pemilihan umum”, *Harian Umum*, 12
Februari 1957.

“Seruan CC PKI hadapi pemilihan umum”, *Harian Umum*, 12
Februari 1957.

“Tanda gambar masuk DPRD”, *Harian Umum*, 26 April 1957.

“Tanda gambar masuk DPRDP”, *Harian Umum*, 26 April 1957.

“Tandagambar mirip Djawa Timur diurus Menteri Dalamnegeri”,
Harian Rakjat, 12 Juni 1957.

“Tandagambar mirip Djawa Timur diurus Menteri Dalamnegeri”,
Harian Rakjat, 12 Juni 1957.

“Terus berdjjuang melawan tandagambar jang mirip”, *Harian Rakjat*, 8 Mei 1957.

“Terus berdjjuang melawan tandagambar jang mirip”, *Harian Rakjat*, 8 Mei 1957.

“Tjegah kenaikan harga barang², padjak untuk modal asing”,
Harian Umum, 11 Juli 1957.

“Tjegah kenaikan harga barang², padjak untuk modal asing”,
Harian Umum, 11 Juli 1957.

“Untuk Pemerintah Daerah jang lebih demokratis dan perbaiki
tingkat hidup rakjat”, *Harian Rakjat*, 13 Juni 1957.

“Untuk Pemerintah Daerah jang lebih demokratis dan perbaiki
tingkat hidup rakjat”, *Harian Rakjat*, 13 Juni 1957.

“Usaha “Usaha P.K.I: Walikota – Komunis untuk Surabaya!”,
Surabaya Post, 19 Juli 1957.

P.K.I: Walikota – Komunis untuk Surabaya!”, *Surabaya Post*, 19
Juli 1957.

Buku & Hasil Penelitian

- Aidit, D.N. (1955a). *Lahirnja PKI dan Perkembangannja*. Jakarta: Jajasan Pembaruan.
- _____. (1955b). *Untuk Kemenangan Front Nasional dalam Pemilihan Umum*. Jakarta: Jajasan Pembaruan.
- Anderson, Benedict R. O'G. (2000). *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*, terj. Revianto Budi Santoso. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Bari, Ahmad Fathul. (2008). "Strategi Partai Komunis Indonesia Terhadap Petani dan Pengaruhnya di Jawa Timur (1953-1965)". *Skripsi*, Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok.
- Eklöf, Stefan. (2004). *Power and Political Culture in Suharto's Indonesia*. Copenhagen: NIAS Press.
- Feith, Herbert dan Lance Castles (ed.). (1995). *Pemikiran Politik Indonesia*. Cet. II. Jakarta: LP3ES.
- Hindley, Donald. (1961). "The Communist Party of Indonesia 1951-1961: A Decade of the Aidit Leadership". *Disertasi*, Australian National University, Canberra.
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Cet. I. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Kasdi, Aminuddin. (2009). *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Surabaya: YKCB dan CICS Surabaya.
- Kroef, Justus M. van der. (1956). *Indonesia in Modern World*. Part 1. Bandung: Masa Baru.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Cet. II. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leirissa, R.Z. dan Saleh As'ad Djamhari (ed.). (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI, Republik Indonesia: Dari Proklamasi Sampai Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Maulida, Faishal Hilmy. (2019). *Sejarah Pemilu yang Dihilangkan*. Cet. I. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Mortimer, Rex. (2006). *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Radyatma, Rendy. (2014). "Pertarungan Kampanye PKI, Nahdatul Ulama, dan Masjumi Menjelang Pemilu Tahun 1955 di Surabaya". *Skripsi*, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya.

- Sanit, Arbi. (2000). *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- SD, M. Subhan. (2021). *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950–1955*. Cet. I. Yogyakarta: Matabangsa.
- Sonhaji, Moh. dan Faishal Hilmy Maulida. (2020). “Komunikasi Politik dan Kecenderungan Pilihan Partai Kaum Santri dan Abangan pada Pemilu 1955”. *Nyimak*. Vol. 4, No. 1, hlm. 109–124.
- Suwarno. (2015). *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Cet. II. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Taylor, Jean Gelman. (2003). *Indonesia: peoples and histories*. New Haven: Yale University Press.
- Utomo, Satriono Priyo. (2019). *Politik Dipa Nusantara*. Yogyakarta: Penerbit Kendi.
- Wertheim, W.F. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*. Cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana.

